



## ANALISIS KONSEP *GREEN ECONOMY* TERHADAP POTENSI PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL DI SUMATERA UTARA

Tiara Ermelia<sup>1</sup>, Imsar<sup>2</sup>, Rahmat Daim Harahap<sup>3</sup>

### AFILIASI:

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

### \*KORESPONDENSI:

[tiaraermelia83@gmail.com](mailto:tiaraermelia83@gmail.com)

THIS ARTICLE IS AVAILABLE IN: <https://e-journal.umc.ac.id/index.php/JPK>

DOI: [10.32534/jpk.v10i2.4049](https://doi.org/10.32534/jpk.v10i2.4049)

### CITATION:

Ermelia, T., Imsar, I., & Harahap, R. (2023).  
ANALISIS KONSEP *GREEN ECONOMY*  
TERHADAP POTENSI PENGEMBANGAN  
PARIWISATA HALAL DI SUMATERA UTARA.  
Jurnal Proaksi, 10(2), 226 - 245.  
<https://doi.org/10.32534/jpk.v10i2.4049>

### Riwayat Artikel :

Artikel Masuk:  
4 Juni 2023

Di Review:  
16 Juni 2023

Diterima:  
30 Juni 2023

### Abstrak

wisata halal memainkan peran penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan yang merupakan isu global mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan juga dimasukkan ke dalam konsep halal. Tujuan penelitian adalah bagaimana konsep Ekonomi Hijau terhadap potensi pengembangan wisata halal di Sumatera Utara. Langkah deskriptif digunakan peneliti untuk menggambarkan data yang diperoleh menerapkan metode penelitian kualitatif. Strategi pengumpulan informasi diselesaikan dengan pertemuan dan persepsi. Hasil penelitian ini adalah pemanfaatan Ekonomi Hijau dalam potensi terciptanya industri perjalanan halal di Sumut belum dapat dilakukan mengingat belum banyak pendukung bagi industri perjalanan halal, untuk misalnya tempat beribadah, makanan halal, penginapan syariah, manfaat pendamping lokal yang belum terjamin kehalalannya. Padahal Sumut sudah tepat menerapkan wisata halal dari sisi objek wisata karena objek wisata Sumut yaitu Danau Toba merupakan salah satu destinasi wisata prioritas yang telah mendukung ekonomi hijau.

**Kata Kunci:** Pariwisata halal, Ekonomi Hijau

### Abstract

*Halal tourism plays an important role in achieving sustainable development. Sustainable development which is a global issue that affects every aspect of human life namely economic, social and environmental is also included in the halal concept. . descriptive steps researchers used to describe the data obtained using qualitative research methods. The information gathering strategy is completed by meeting and perception. The results of this study are that the utilization of the Green Economy in the potential for creating a halal travel industry in North Sumatra cannot be carried out considering that there are not many supporters for the halal travel industry, for example places of worship, halal food, sharia lodging, the benefits of local companions whose halal status is not guaranteed. Even though North Sumatra has been right to implement halal tourism in terms of tourist objects because North Sumatra's tourist attraction, Lake Toba, is one of the priority tourist destinations that have supported a green economy.*

**Keywords:** Halal tourism, Green Economy

## PENDAHULUAN

Menurut pemerintah Kota Medan, Cara hidup manusia saat ini sangat mudah untuk memanfaatkan sumber daya alam yang membahayakan nyawa makhluk hidup lainnya. Produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa berkontribusi pada peningkatan emisi gas rumah kaca, yang mengurangi tutupan hutan dan mengakibatkan kepunahan banyak spesies dan keanekaragaman hayati. Indonesia telah ikut aktif melakukan upaya mitigasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) untuk mencegah terjadinya peningkatan emisi GRK, sebagaimana tertuang *Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia*. Updated NDC Indonesia telah disampaikan kepada UNFCCC pada Juli 2021. Indonesia juga memiliki peta jalan (road map) menuju netral karbon tahun 2060 (atau lebih cepat) sesuai strategi jangka panjang untuk rendah karbon dan ketahanan iklim "Long-term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR 2050)" (Erwinsyah, 2021). Konsep "Green Economy", yang dimaksudkan untuk meningkatkan motivasi konsumen dan penerima manfaat untuk terlibat dalam perilaku ramah lingkungan, menjadi sangat penting. Dengan demikian, ekonomi hijau berfungsi sebagai penghubung antara pengelolaan lingkungan dan konservasi sumber daya, pertumbuhan ekonomi, dan keadilan sosial.

Sumatera Utara merupakan salah satu daerah modern yang memiliki kekayaan alam melimpah. Pembangunan infrastruktur jalan tol, rel kereta api, LRT, kawasan industri, pariwisata, dan peluang pengembangan potensial lainnya melengkapi sumber daya alam Sumatera Utara. Industri pengolahan kelapa sawit, pengolahan karet, pariwisata, dan logistik menjadi fokus utama sei mangkai. Menurut Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia, KEK Sei Mangkai diproyeksikan memiliki opsi menarik all out venture sebesar Rp 129 triliun dan mempertahankan tenaga kerja sebanyak 83.304 orang pada tahun 2031. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan jenis pembangunan yang mempertimbangkan aspek sosial, faktor lingkungan, dan ekonomi (Indonesia). Hal ini sesuai dengan tujuan utama dari *Sustainable development goals (SDGs)*. Selain pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sumut, juga berpusat pada hilirisasi produk pertanian, perkebunan, dan perikanan. Begitu juga industri travel, khususnya untuk industri travel khususnya Danau Toba yang telah ditetapkan sebagai salah satu dari lima Super Need Industri travel Keberatan Otoritas Publik, Danau Toba merupakan DPSP utama di Indonesia yang disuplai dari energi bersih PLN. Melalui 10 megawatt hour (MWh) Renewable Energy Certificate (REC), DPSP Danau Toba siap menjadi tujuan wisata yang mengurangi produk sampingan bahan bakar fosil. Pada semester I 2022, pertumbuhan industri pariwisata terus berkembang. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah wisatawan asing (wisatawan) yang berkunjung ke Sumatera Utara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, kunjungan wisatawan mancanegara pada Juni 2022 mencapai 5.165 orang, meningkat 33,47 persen dibandingkan Mei 2022 sebanyak 3.861 wisatawan asing.c

Salah satu industri pariwisata yang sedang berkembang dan potensial di Indonesia adalah industri pariwisata halal. Pariwisata halal menjadi isu global, khususnya di Sumatera Utara. (Mafudi et al., 2021), Karena banyaknya pelaku industri pariwisata yang belum memiliki legalitas sertifikasi usaha, maka belum ada kerangka hukum yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pariwisata halal di Sumatera Utara. Akibatnya, pengembangan wisata halal di Sumut belum signifikan. Peraturan sangat penting dalam hal ini. Terkait penyelenggaraan wisata halal akan diatur kepatuhan bagi pelaku usaha, konsumen, dan peralatan. Tentu, peraturan pariwisata halal diwajibkan oleh sistem hukum Indonesia. Bagaimanapun, jangan terburu-buru karena standar umum dapat ditemukan dalam prinsip dunia global sehubungan dengan industri perjalanan halal (Darmalaksana & Busro, 2021) Hanya 16,79 persen industri pariwisata yang sudah menerapkan konsep wisata halal, dan

83,21 persen belum menerapkannya, menurut data ekonomi kreatif kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif mengenai statistik industri pariwisata dan ekonomi kreatif. ([Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2020](#)) Terlepas dari kenyataan bahwa pasar industri perjalanan halal di bidang dunia, industri perjalanan halal adalah sektor bisnis yang menjanjikan. Menurut laporan Mastercard Crescentrating Global Travel Market Index (GMTI) dari tahun 2019, akan ada 230 juta wisatawan Muslim di seluruh dunia pada tahun 2026. Ini meningkat dari sekitar 140 juta pada tahun 2018. Menurut Laporan Ekonomi Islam Global, pendapatan pariwisata halal global adalah diperkirakan akan tumbuh dari US\$177 miliar pada tahun 2017 menjadi US\$274 miliar pada tahun 2023, sejalan dengan prakiraan tersebut. ([Mastercard-Crescentrating, 2022](#)). Hal ini menunjukkan bahwa wisata halal memainkan peran penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan, dan penilaian lingkungan adalah salah satu program terbaru yang masuk dalam kategori indeks laporan Islam global. Memperhatikan kesiapan wisatawan untuk menggunakan fasilitas dengan konsep syariah yang disesuaikan dengan kebutuhannya merupakan bagian terpenting dalam mempersiapkan wisata syariah. Selain itu, penting untuk memperhatikan perspektif daerah tujuan wisata mengenai konsep wisata syariah terkait dengan potensi kemajuan ekonomi. Kementerian Pariwisata RI juga telah menetapkan target 20 juta wisman dalam program nasional, dimana 5 juta di antaranya adalah umat Islam. Bukan tidak mungkin Indonesia menjadi tujuan wisata utama dan terpenting di Indonesia, mengingat keseriusan pemerintah dan pendukung pariwisata terkait serta potensi berbagai destinasi wisata di setiap daerah. ([Ferdiansyah, 2020](#))

Pembangunan berkelanjutan, yang merupakan isu global yang mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia—ekonomi, sosial, dan lingkungan—juga dimasukkan ke dalam konsep halal. Demikian pula, keberlanjutan menjadi isu yang semakin mendesak, menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor ekonomi terpenting. Beberapa organisasi, seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), telah mendefinisikan pariwisata berkelanjutan. Selain itu, wisata halal yang juga dikenal sebagai wisata ramah Muslim atau wisata Islami merupakan konsep anyar dalam wisata industri yang menghadirkan peluang baru yang menarik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Bisnis halal, pada kenyataannya, membahas beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan dapat membuat komitmen besar terhadap pengelolaan keuangan. Untuk menghindari kesalahpahaman di kalangan konsumen non-Muslim dan untuk mempromosikan persepsi positif secara universal di antara semua tingkat konsumen di seluruh dunia, penting untuk mengklarifikasi definisi dan konsep pariwisata halal. ([Siregar & Ritonga, 2021](#)).

Penulisan artikel ini selanjutnya diharapkan dapat mengkaji pemanfaatan gagasan ekonomi hijau di Sumut dalam memusatkan perhatian pada peningkatan industri perjalanan wisata halal di Sumatera Utara secara meningkat karena industri perjalanan wisata halal dapat menjadi semacam pendapatan di Sumatera Utara dengan alasan bahwa pasar halal semakin meluas dan masyarakat sekitar serta wisatawan asing yang berkunjung ke Sumatera Utara berbeda dengan muslim.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Konsep Green Economy**

Menurut beberapa sudut pandang, green economy merupakan transformasi ekonomi yang tidak dapat dihindari dalam menghadapi kemajuan teknologi dan kelestarian lingkungan; gagasan ekonomi hijau adalah gagasan yang dipandang restriktif yang harus diterapkan di negara-negara maju dan kaya dan bagi negara-negara non-industri dapat mengganggu perbaikan dan dapat membangun berapa banyak kemelaratan ([Kristianto, 2020](#)). Istilah “pembangunan berkelanjutan” diperkenalkan oleh Hans Carl von Carlowitz dan mengacu pada bentuk pengelolaan hutan dimana setiap pohon yang ditebang diganti dengan bibit baru, Konsep pembangunan berkelanjutan hadir di berbagai bidang aktivitas manusia, seperti bisnis atau sistem positif lingkungan. Dasar tugas

pembangunan berkelanjutan adalah untuk memaksimalkan keuntungan bersih dari pertumbuhan ekonomi sementara melindungi dan memastikan bahwa sumber daya alam diperbarui dalam jangka panjang. Konsep industri 4.0 merupakan bentuk cerdas dari pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi melalui kemajuan teknologi, kelembagaan, dan sosial dan meminimalkan energi konsumsi. (Zhironkin & Cehlár, 2022). Jadi 'Ekonomi Hijau' merupakan sebuah konsep perilaku ekonomi yang memperhatikan pertumbuhan ekonomi bersamaan dengan konsep pencegahan kerusakan lingkungan alam dan menurunnya kualitas lingkungan komunal. Sehingga tercipta sistem ekonomi yang adil, inklusif dan berkelanjutan (Soesanto, 2022).

Setelah Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan, gagasan ekonomi hijau mendapat banyak perhatian internasional. Hal ini sesuai dengan berlanjutnya kekhawatiran atas masalah keuangan dan ekologi global di planet kita mulai dari perubahan lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, penurunan tanah hingga meningkatnya kekurangan sumber daya alam. Program Iklim Negara-Negara yang Bersatu di seluruh dunia (UNEP) mencirikan ekonomi hijau sebagai kerangka moneter yang menghasilkan peningkatan kemakmuran manusia dan hak-hak sipil, sementara pada dasarnya mengurangi pertaruhan alami dan kekurangan biologis. "Kehijauan" ekonomi dapat meningkat sebagai akibat dari perhatian pemerintah terhadap pengukuran ekonomi hijau yang jelas di antara negara-negara. Hal ini dapat membantu mengkarakterisasi tugas ekonomi hijau dalam rencana pasca-2015: mengakhiri konflik yang muncul ketika pemerintah mencoba mencapai berbagai tujuan SDG, komitmen COP 21, dan prioritas nasional mereka sendiri. Penelitian Ciocoiu menemukan bahwa ekonomi hijau dapat menawarkan solusi dalam jangka panjang (Bambang Sutikno, 2017). Salah satu tanggapan terhadap tantangan perubahan iklim dan memastikan berkelanjutan pembangunan adalah Pengetahuan Ekonomi Hijau. Pada (Georgeson et al., 2017) Pertumbuhan hijau merupakan strategi untuk mencapai beberapa tujuan yang secara bersama-sama berpotensi membawa Indonesia lebih dekat pada pembangunan yang benar-benar berkelanjutan. Pertumbuhan hijau dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan nasional dan taraf hidup secara berkelanjutan dan berkeadilan. Ini juga bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan mengurangi polusi, mengembangkan infrastruktur yang ramah lingkungan dan tahan lama, memanfaatkan sumber daya dengan lebih baik, dan menciptakan nilai aset alam yang sebelumnya berkontribusi pada kesejahteraan manusia dan kesuksesan ekonomi. Makna pembangunan moneter hijau terus meningkat; Definisi ini dikembangkan dan disempurnakan lebih lanjut sebagai hasil dari pengalaman negara-negara yang menguji apa yang berhasil dan apa yang tidak. (GGGI, 2016). Hal yang terpenting dari rencana pembangunan, apabila dilihat dari konsep ekonomihijau melalui pendekatan yang komprehensif antara ketergantungan ekonomi dan ekosistem dengan melihat bagaimana mengatur jumlah alam yang sedikit dari aktivitas ekonomi secara berkesinambungan yang ditetapkan dalam prioritas nasional dalam jangka panjang untuk tahun 2005-2025 (UU No 17/2007), bahwa kebijakan yang diatur sebagai implementasi green economic membangun peningkatan ekonomi yang sejalan dengan kaidah pemeliharaan lingkungan serta menemukan sumber baru melalui penggunaan SDA sekitar sehingga menciptakan lapangan pekerjaan untuk menurunkan angka kemiskinan secara kontiniu. Dikaitkannya Ekonomi hijau dengan pengentasan kemiskinan adalah untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat sekitar. (Faried, 2020)

Dihubungkan dengan kemungkinan gagasan ekonomi hijau, ada dua hal yang harus dicapai. Pertama, ekonomi hijau bertujuan untuk mengembangkan konsep ekonomi yang tidak hanya mempertimbangkan faktor ekonomi makro, seperti investasi pada industri yang menghasilkan barang dan jasa yang ramah lingkungan dan produksi barang dan jasa yang lebih ramah lingkungan (green investment), tetapi juga cara investasi mendorong tumbuhnya lapangan kerja ramah

lingkungan (green jobs). Kedua, Ekonomi Hijau bertujuan untuk mengembangkan pedoman investasi hijau yang berpihak pada masyarakat miskin atau yang memiliki potensi untuk mengentaskan kemiskinan. Tujuan utamanya adalah untuk memotivasi pembuat kebijakan untuk melibatkan semua tingkat pemerintahan serta sektor swasta dalam mendukung peningkatan investasi hijau. Gagasan Ekonomi Hijau mendapat perhatian lebih dalam beberapa tahun terakhir karena sejalan dengan upaya masyarakat global untuk menemukan solusi atas tantangan global saat ini.

### Pariwisata Halal

Pesatnya perkembangan perbankan dan uang syariah di dunia juga berdampak pada bidang bisnis lainnya, salah satunya adalah bisnis travel industry. Saat ini bisnis travel industry secara syariah telah berkembang pesat (Mabrurin & Latifah, 2021). Konsep halal dalam konteks pariwisata merupakan bukti keterlibatan ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupan seorang muslim karena Islam adalah agama yang komprehensif, Keyakinan mendasar umat Islam adalah bahwa Islam memiliki konsep holistik dan komprehensif serta memberikan solusi bagi banyak masalah dan kebutuhan umat Islam melalui penerapan berbagai nilai yang terkandung di dalamnya terminologi halal memiliki jangkauan implementasi yang meliputi hubungan manusia, etika berpakaian dan perilaku, transaksi sosial dan bisnis, perdagangan, jasa dan investasi dan aspek lainnya sesuai dengan prinsip dan arahan yang ditetapkan dalam Islam termasuk kebutuhan bepergian yang tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam Islam. (Junaidi, n.d.). Pariwisata halal dikembangkan sebagai usaha pariwisata yang dijalankan dengan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam ketersediaan layanan yang ramah serta fasilitas yang aman dan nyaman bagi wisatawan (GMTI, 2017). Prinsip-prinsip Islam ini berlandaskan konsep kesejahteraan manusia dan penghidupan yang baik atas dasar persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi, Hal ini tidak terlepas dari cakupannya terhadap aspek sosial budaya, sosial ekonomi, dan lingkungan kehidupan, yang mana aspek tersebut merupakan pondasi konsep pariwisata berkelanjutan. (Dwi et al., 2023)

Sesuai satu buku yang sangat definitif bernama 'Apa yang Halal dan Apa yang Ditolak dalam Islam', yang disusun oleh Sheik Yusuf al-Qaradawi, seorang peneliti Islam yang dihormati di seluruh dunia dan direktur Asosiasi Peneliti Muslim Global, istilah Halal dicirikan sebagai "Apa masuk akal, yang tidak memiliki batasan, dan tindakan yang diizinkan oleh pemberi hukum, Allah. Dengan cara ini, istilah Halal berarti 'dapat diterima' sesuai pelajaran Islam (peraturan Syariah). Halal juga merupakan salah satu dari lima tindakan (al ahkam alkhamsah) yang menentukan moralitas perilaku manusia dalam Islam, yang lainnya adalah Fard (yang wajib), Mustahabb (yang dianjurkan), Makruh (yang tidak disukai orang), dan Haram. Menurut ajaran Islam, setiap praktik atau kegiatan pariwisata yang "diperbolehkan" dianggap halal dalam definisi di atas. (Battour & Ismail, 2016).

Pariwisata halal memiliki potensi bisnis yang besar. Landasan utama pariwisata halal adalah Al-Qur'an surat Al mulk ayat 15

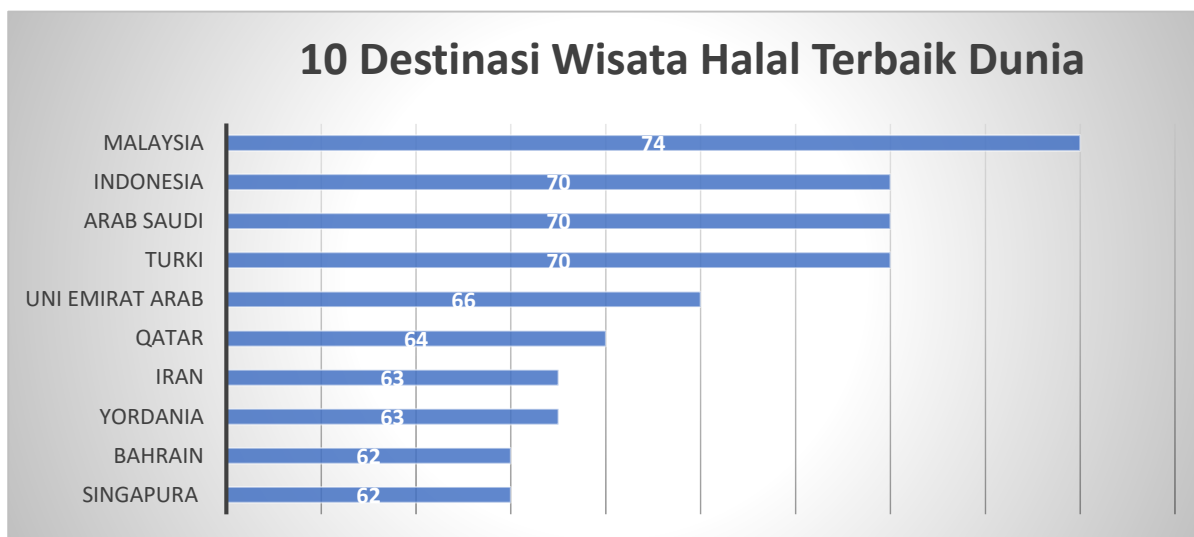
هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya : "Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan." (QS. Al- Mulq : 15).

Pariwisata halal, sebagaimana didefinisikan oleh Global Muslim Travel Index, adalah pariwisata yang menganut prinsip-prinsip Islam dan menampilkan fasilitas dan layanan yang ramah bagi umat Islam. Selama bulan Ramadhan, pelayanan dan fasilitas tersebut antara lain tersedianya

sarana dan prasarana ibadah (fasilitas wudhu dan mushola) yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, tersedianya makanan dan minuman yang terjamin kehalalannya, fasilitas umum yang memadai ( toilet dan air bersih), dan tidak adanya perjudian dan minuman beralkohol. (Bustamam & Suryani, 2022).

Laporan GMTI (2018) menyatakan bahwa sejumlah faktor berkontribusi terhadap perluasan pariwisata halal, antara lain generasi Muslim milenial, peningkatan akses informasi perjalanan, peningkatan penyedia layanan perjalanan yang melayani kebutuhan ibadah Muslim (muslim-friendly). , Travel Ramadan, dan bisnis travel. Standar keseluruhan industri perjalanan wisata syariah adalah yang pertama, memiliki arah untuk kemaslahatan semua orang. Kedua, memiliki arah penerangan, pahala, dan ketenangan. Ketiga, jauhkan dari kemusyrikan dan anggapan yang janggal. Keempat, tanpa maksiat. Kelima, menjaga keamanan dan kenyamanan. Keenam, menjamin kelestarian lingkungan. Ketujuh, memperhatikan kualitas sosial-sosial dan wawasan yang dekat. Sumber : Mastercard-CrescentRating Global Muslim Travel Indexs 2022.



Gambar 1 Destinasi Wisata Halal Terbaik Dunia

Menurut standar Global Muslim Travel Index (GMTI), Malaysia melanjutkan peringkat pertama, diikuti oleh Turki dan Arab Saudi yang bersama Indonesia menempati peringkat kedua mengalahkan 138 destinasi lainnya. Hal ini dapat dilihat pada gambar di atas. Akses, Komunikasi, Lingkungan, dan Layanan adalah empat kriteria penilaian strategis yang digunakan dalam analisis laporan GMTI. Dapat dikatakan bahwa wisata halal tidak membenarkan suatu lokasi melainkan memberikan pelayanan kepada wisatawan muslim sehingga mereka dapat memenuhi tanggung jawabnya dan menghindari kemusyrikan meskipun sedang berlibur. Seperti yang terlihat pada tabel di atas, kinerja Indonesia telah meningkat secara signifikan, sehingga meningkatkan pariwisata halal di tanah air berkat posisinya di nomor dua bersanding dengan arab saudi dan turki di Global Muslim Travel Index. Dengan berkembangnya perkantoran, peningkatan kualitas, bahkan bantuan dari kerangka keuangan campuran, industri travel halal di Indonesia juga akan memperluas daya tarik tempat wisata dan memberikan tingkat yang lebih nyaman bagi calon wisatawan muslim yang bergabung. Salah satunya adalah wisata halal. dari perkembangan inovatif ini karena ini.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Bappelitbang dan Dinas Ekonomi Inovatif Dinas Pariwisata Sumatera Utara. Metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis

penelitian kualitatif yang berfokus pada pengujian teori dengan mengukur variabel dan mengolah data terkait. Penelitian kualitatif menurut Hendryadi, et. al, (2019:218) merupakan proses penyelidikan naturalistik yang mencari pemahaman mendalam tentang fenomena sosial secara alami. Informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertemuan dan dokumentasi dengan satu orang staf Bapellitbang dan satu orang staf dari Divisi Industri Perjalanan dan Ekonomi Imajinatif. Data dikumpulkan berdasarkan wawancara dan didukung oleh penelitian kuantitatif untuk melengkapi data yang hilang dari hasil wawancara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Green Economy di Sumatera Utara*

Umumnya, ekonomi hijau memiliki beberapa definisi, khususnya ekonomi yang masuk akal di mata publik dengan mengkonsumsi semua aset yang biasanya berkelanjutan dan tanpa mengandung produk sampingan bahan bakar fosil. Rendah karbon, hemat sumber daya, dan inklusif secara sosial adalah klaim utamanya. Kemudian hal yang paling menarik adalah bahwa ekonomi hijau dapat meningkatkan nilai modal/bumi normal, beberapa area dalam ekonomi hijau adalah inovasi tanpa noda, mengembangkan lebih lanjut fondasi air baru, memperluas energi praktis, transportasi rendah karbon dengan rencana hemat energi, inovasi pengelolaan limbah bersih, area hortikultura dan layanan ranger yang layak, perubahan dalam strategi area usaha publik didukung oleh perbaikan dalam pengaturan global dan kerangka pasar (Kristianto, 2020). UNEP (2010) telah memberikan beberapa elemen mendasar yang mendefinisikan dan menjelaskan inti prinsip dan konsep yang mendasari ekonomi hijau. Penyewa utama inisiatif ekonomi hijau ini adalah: berinvestasi dalam modal alam; dekarbonisasi ekonomi; dan menciptakan pekerjaan hijau. Sektor yang dianalisis dalam laporan UNEP adalah: pertanian, kota, hutan, energi terbarukan, transportasi, air, bangunan, perikanan, industri, pariwisata, dan pengelolaan limbah (Ciocoiu, 2016).

Saat ini, seluruh wilayah Indonesia dari Sabang dan Merauke sedang berupaya mendorong Indonesia untuk bangkit dan menurunkan produk sampingan bahan bakar fosil untuk mencapai pergantian peristiwa yang berkelanjutan. Sesuai dengan Peraturan Pelaksana No. 111 Tahun 2022 tentang Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan. Khusus di Sumatera Utara, salah satu pemanfaatan gagasan ekonomi hijau di Wilayah Sumatera Utara adalah pengembangan Kawasan Moneter Luar Biasa Sei Mangkei di Rezim Simalungun dan berubah menjadi Zona Ekonomi Hijau atau kawasan ekonomi hijau utama dan menjadi percontohan di Indonesia. . Investasi yang dilakukan PT Unilever yang sudah memanfaatkan energi dan bahan baku yang ramah lingkungan menjadi salah satu indikator yang menunjukkan Zona Ekonomi Hijau di KEK Sei Mangkei. Keberadaan pabrik kelapa sawit (PKS) dan rantai pasokannya, yang keduanya telah mendapatkan sertifikat RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil) dari TUV RHEILAND, menjadi indikator lainnya. Kemudian, untuk membantu PT Pertamina membuat pembangkit listrik tenaga biogas dengan limit 2000 watt (MW). Tujuan utama pembentukan KEK Sei Mangkei adalah untuk memberdayakan pembangunan moneter, pergantian peristiwa yang tidak memihak, dan peningkatan intensitas. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei akan membantu pertumbuhan berbagai sektor industri, pariwisata, dan perdagangan di wilayah tersebut. Rahasia Pertahanan KEK (2019) menunjukkan bahwa KEK Sei Mangkei menyumbang Rp. 11,226 miliar kepada perekonomian Indonesia. Kemajuan pergantian peristiwa dan pemeliharaan KEK Sei Mangkei terkait erat dengan pemanfaatan standar ekonomi hijau sebagai bentuk perluasan kepentingan lokal. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan terus berinvestasi di KEK Sei Mangkei, yang merupakan rumah bagi bisnis yang menjunjung tinggi prinsip Ekonomi Hijau, dan akan menerapkan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan daerah. Namun masih banyak kendala dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi di Sumut, antara lain strategi keuangan, akses permodalan, akses inovasi hijau hingga SDM yang sensitif terhadap iklim, pemahaman masyarakat akan pentingnya green perspektif

ekonomi dan administrasi. Upaya mewujudkan Ekonomi Hijau memang terkendala sejumlah kendala. Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Bapelitbang Sumut, penerapan Ekonomi Hijau di Sumut menghadapi sejumlah tantangan. Hambatan untuk menerapkan ekonomi hijau yaitu:

**Pertama**, Kemajuan menuju Ekonomi Hijau menuntut investasi dan kehati-hatian serta upaya yang konsisten, meskipun kerja dan waktu yang dihabiskan dalam proses tersebut akan diurus sejak saat ini. Banyak sekali dampak dari pandemi kemarin, seperti besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan Ekonomi Hijau dan penurunan pendapatan daerah yang besar. **Kedua**, Mahalnya biaya untuk membangun industri hijau baru dengan bantuan teknologi, harga barang mungkin mahal. Bagian untuk pengaturan biaya barang dagangan terkait dengan spekulasi fundamental dan modal kerja, dari biaya produksi untuk dispersi dan biaya bawahan. Jika ada insentif untuk produk hijau, ini bisa dikurangi. **Ketiga**, Produk ramah lingkungan selalu lebih mahal daripada produk biasa. Pengujian harga produk ramah lingkungan membutuhkan ekspektasi pendekatan yang pasti bagi industri atau dunia usaha bahkan konsumen yang menggunakan produk ekologis sehingga harga produk ramah lingkungan semakin murah. **Keempat**, Untuk penemuan baru yang membutuhkan dukungan penelitian yang luas, pemerintah membutuhkan biaya investasi yang signifikan. Kebijakan yang meskipun membutuhkan pengeluaran yang besar, dapat didorong oleh kemauan politik yang kuat untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Lingkungan yang berkelanjutan adalah investasi paling signifikan untuk kehidupan masa depan. **Kelima**, Korupsi oleh pejabat yang tidak jujur akan lebih mungkin terjadi pada tahap awal pembangunan ekonomi hijau. Ini menghadirkan masalah tersendiri. Politisi yang tergiur oleh perasaan pengusaha yang mementingkan keuntungan jangka pendek akan menghadapi upaya mengawal kebijakan yang berpihak pada lingkungan.

Dalam pergantian peristiwa yang dapat dipertahankan, ekonomi hijau memiliki kegiatan yang signifikan termasuk memusnahkan kemelaratan dan mengupayakan kepuasan pribadi tanpa melenyapkan sistem biologis dan aset normal yang ada. Demikian pula, ekonomi hijau juga membutuhkan modal fisik, mekanik, dan moneter yang dibuat dari ketergantungan pada sumber energi tak terbarukan yang menyebabkan kemalangan normal. (Ekonomi et al., 2023). Konsep "ekonomi hijau" mencakup ide-ide dari banyak pendekatan lain di bidang ekonomi dan filosofi yang terkait dengan masalah pembangunan berkelanjutan, Pendukung konsep "ekonomi hijau" percaya bahwa sistem ekonomi yang berlaku saat ini tidak sempurna, meskipun telah memberikan hasil yang cukup berarti dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun, hal itu juga mengakibatkan sejumlah masalah lingkungan (perubahan iklim, penggurunan, hilangnya keanekaragaman hayati), penipisan modal alam, kemiskinan berskala besar, kekurangan air bersih, pangan, energi, ketidaksetaraan manusia dan negara. Kelangsungan hidup dan perkembangan umat manusia membutuhkan transisi ke "ekonomi hijau". Ini adalah sistem kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa yang mengarah pada peningkatan (Lavrinenko et al., 2019).

Dalam menjalankan Ekonomi Hijau di Sumut, terjadi perbaikan moneter di Sumut. Perekonomian Sumut triwulan II 2022. Perekonomian Sumut pada triwulan II 2022 tumbuh sebesar 4,70 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan I sebesar 3,95 persen (yoy). Sejalan dengan periode HBKN Idul Fitri, konsumsi rumah tangga yang meningkat serta kinerja perdagangan dan investasi eksternal yang tetap terjaga mendukung pesatnya pertumbuhan ekonomi Sumut. Sementara itu, meski masih tercatat mengalami kontraksi, konsumsi pemerintah mulai membaik. Dari Bidang Usaha, akselerasi kinerja seluruh lapangan usaha utama, antara lain Perdagangan, Pertanian, Konstruksi, dan Industri Pengolahan, akan mendukung pertumbuhan ekonomi Sumut pada triwulan II tahun 2022. Namun menurut data BI, angka kemiskinan meningkat di perkotaan. sementara kemiskinan menurun di pedesaan. Di pedesaan, 528 ribu orang miskin



hidup pada Maret 2022, turun 3,6% dari kuartal sebelumnya. di wilayah metropolitan lebih dari 739 ribu orang atau peningkatan 2,04% secara triwulanan. Tingkat kemiskinan pedesaan 7,98% lebih rendah dari tingkat kemiskinan perkotaan, yaitu 8,76%.(BI, 2022)

Sehubungan dengan pertemuan dengan staf Bapelitbang Sumut, Pemprov Sumut memiliki jaminan perubahan lingkungan kepada para pelaksananya, antara lain melalui Rencana Kegiatan Daerah (RAD-GRK) Bahan Perusak Ozon Tahun 2010-2020 dan Guidmen Pimpinan Perwakilan Sumut Nomor 188/54/ 05/INST/2012 tentang Variasi pada Outrageous Environments. Melanjutkan tanggung jawab saat ini, Pemerintah Bersama Sumut juga sedang menyiapkan laporan Penyusunan Peningkatan Rendah Karbon (PPRK) tingkat daerah, yang akan digabungkan dengan catatan perbaikan Pemerintah Bersama Sumut. Pemprov Sumut juga memiliki target penurunan emisi GRK yang tertuang dalam Pergub No. 36 Tahun 2012. Pemprov Sumut, sebaliknya, mengantisipasi agar calon pengembang proyek dapat membantu upaya penurunan emisi GRK di Sumut. daerah maupun sektor lain yang diprioritaskan karena selama ini sebagian besar aksi perubahan iklim berpusat pada industri kehutanan. Beberapa area relief dan variasi yang saat ini sangat penting antara lain: (1) Konservasi hutan dan penggunaan lahan; 2) Fleksibilitas finansial melalui ketahanan pangan; (3) Penyediaan air bersih dan sanitasi; dan (4) pengelolaan sampah perkotaan. Keempat bidang kebutuhan ini dapat menjadi contoh fokus bagi mereka yang ingin bergerak dalam bidang lingkungan hidup di Sumatera Utara. Keadaan khusus akan diperlukan untuk transisi ekonomi hijau. Kondisi perekonomian nasional merupakan salah satu kondisi yang menguntungkan tersebut. (Sverdan, 2021).

### Perkembangan pariwisata halal di sumatera utara

Industri perjalanan adalah bidang yang sangat penting dalam melaksanakan tujuan peningkatan yang layak, karena industri perjalanan memainkan peran penting dalam perlindungan sosial, jaminan ekologi, keharmonisan dan keamanan, membuat posisi, pengembangan keuangan, peningkatan, menyumbang 1,6 triliun bidang komoditas, 10% produk domestik bruto dunia, 7% komoditas dunia, 30% perdagangan administrasi. Seperti yang ditunjukkan oleh (UNWOT, 2018), pariwisata yang berkesinambungan harus:

**Pertama**, Maksimalkan sumber daya lingkungan, yang penting untuk pertumbuhan pariwisata, pemeliharaan proses ekologi penting, dan kontribusi Anda terhadap pelestarian warisan alam dan keanekaragaman hayati. **Kedua**, Berkontribusi pada pemahaman dan toleransi antar budaya dengan menghormati keaslian sosial budaya masyarakat tuan rumah, melestarikan warisan budaya dan nilai-nilai tradisional mereka. **Ketiga**, Menjamin kegiatan keuangan praktis jangka panjang, memberikan keuntungan finansial kepada semua mitra yang adil, termasuk bisnis yang stabil dan pengadaan gaji potensi pintu terbuka dan layanan sosial untuk memiliki jaringan, dan menambah penurunan kemiskinan.

Meskipun memiliki lima agama resmi dan ratusan suku, Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia yang menyumbang 12,7% dari Muslim dunia. Menurut laporan terbaru, sekitar 222 juta orang, atau 87% dari populasinya adalah Muslim, Oleh karena itu Indonesia merupakan negara dengan potensi terbaik di Asia Tenggara yang memiliki kemampuan untuk mengarahkan fokus utama industri pariwisata ke arah pariwisata Halal (Yan et al., 2017). Wisata halal merupakan salah satu jenis wisata yang berpotensi memberikan kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan. Halal industri perjalanan adalah industri perjalanan yang dijalankan dengan standar Islam. Istilah "Wisata Islami" digunakan oleh Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk menggambarkan perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan Muslim ke tempat-tempat bersejarah, religius, dan terkait Islam. Wisata halal semacam ini disebut juga sebagai "Halal Friendly Tourism" dan mengacu pada produk wisata yang menganut syariat Islam. Jenis industri perjalanan ini dapat menjadi pilihan bagi wisatawan yang menjauh dari industri perjalanan biasa, berolahraga dengan wanita dan pria di tempat-tempat siang bolong seperti pantai dan kolam renang dengan pakaian ketat yang tidak pantas, dan kafe atau penginapan di mana daging babi atau minuman keras disajikan. (Subarkah & Rachman, 2018).

Fenomena sosial pariwisata halal kini telah menjadi perkembangan baru dalam industri pariwisata baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Namun, masih ada masalah dalam praktiknya, yaitu kurangnya standar perjalanan halal universal yang dapat menyebabkan kebingungan terumenerus di kalangan konsumen (khususnya turis Muslim) dan industri. Kurangnya aturan dan regulasi yang jelas dapat menimbulkan mafsadat dan madharat dalam pengelolaan (State of Global Islamic Economy 2017/2018). (Adinugraha et al., 2021)

Sehubungan dengan pertemuan-pertemuan dengan staf dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumut, pelaksanaan halal travel masih dicemooh oleh semua kalangan, apalagi saat ada pembahasan yang perlu dilakukan oleh pimpinan DPRD Sumut. menjadikan Danau Toba sebagai destinasi liburan halal. Wisata halal harus dihindari karena akan merugikan budaya asli Danau Toba. Global Muslim Travel Index (GMTI) mendefinisikan pariwisata halal sebagai memiliki ekosistem layanan berbasis agama seperti makanan halal, fasilitas sholat, toilet dengan air untuk wudhu, dan bukan lingkungan Islamofobia. Meski wisata halal bukan berarti nonmuslim tidak boleh berkunjung ke Sumut, perlu dipahami bahwa perhatian utama yang mendesak dalam industri perjalanan halal adalah bagaimana tempat-tempat wisata dapat menambah kenyamanan dengan tidak melupakan komitmen kepercayaan dan genggamannya. melalui gerakan, dapat diverifikasi dan warisan sosial. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, kunjungan wisatawan mancanegara pada Juni 2022 mencapai 5.165 orang, meningkat 33,47 persen dibandingkan Mei 2022 sebanyak 3.861 wisatawan asing.

**Table 1** Perkembangan pariwisata halal di Sumatera Utara

Bulan Tahun	Bandar Udara Silangit	Pelabuhan Laut Tanjung Balai Asahan	Pelabuhan Laut Belawan	Bandar Udara Kualanamu
	Wisatawan Mancanegara yang Datang ke Sumatera Utara menurut Pintu Masuk (Orang)	Wisatawan Mancanegara yang Datang ke Sumatera Utara menurut Pintu Masuk (Orang)	Wisatawan Mancanegara yang Datang ke Sumatera Utara menurut Pintu Masuk (Orang)	Wisatawan Mancanegara yang Datang ke Sumatera Utara menurut Pintu Masuk (Orang)
	2022	2022	2022	2022
Januari	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0
Maret	0	0	0	11
April	0	0	0	494
Mei	0	0	0	3.861
Juni	0	0	0	5.165
Juli	0	0	0	7.518
Agustus	0	0	0	10.287
September	0	0	0	5.895
Oktober	0	0	0	11.454
November	0	0	0	10.615
Desember	0	0	0	19.198
Jumlah	0	0	0	74.498

Sumber : BPS Sumatera Utara (Diolah), 2022

Menurut tabel di atas, empat pintu masuk yang memungkinkan pengunjung asing masuk ke Sumatera Utara: Bandara Silangit, Pelabuhan Tanjung Balai Asahan, Pelabuhan Belawan, dan Bandara Kualanamu. Namun, pada tahun 2022 semua wisatawan asing akan mengunjungi Sumatera

Utara hanya melalui terminal Kualanamu Air. Dari 4 kunjungan pada Agustus 2021 menjadi 10.287 kunjungan pada Agustus 2022, jumlah kunjungan wisman ke Sumut meningkat 257.075,00% dibandingkan periode waktu yang sama pada 2021. Pada Juni 2022, Malaysia menyumbang 48,11 persen dari total jumlah kunjungan wisman Sumut disusul Singapura 6,72 persen, Australia 2,50 persen, dan Amerika Serikat 1,49 persen. Negara sisanya adalah Jerman (1,41%), India (1,32%), Inggris (1,24%), Belanda (0,89%), Denmark (0,81%), dan Perancis (0,81%). 65,30 persen dari seluruh wisman yang datang ke Sumut berasal dari sepuluh negara tersebut. (BPS, 2023)

Mayoritas 48,11 persen dari seluruh pengunjung ke Sumut berasal dari luar Malaysia. Guna mendongkrak perolehan devisa negara dari industri pariwisata, hal ini memberikan nilai positif bagi Provinsi Sumatera Utara. Masalahnya, rata-rata turis Malaysia tidak bisa tinggal lama karena infrastruktur dan fasilitas pariwisata di Sumut, khususnya Danau Toba yang menjadi destinasi wisata prioritas, tidak mendukung. Alhasil, turis Malaysia enggan menginap karena negaranya mayoritas Muslim. Menurut temuan wawancara dengan staf Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumut, wisatawan Malaysia mengeluhkan sulitnya mencari makanan halal dan fasilitas hotel di kawasan Danau Toba tidak membantu mereka beribadah, seperti tidak adanya Arah kiblat di kamar mereka. Sehingga mereka tidak berlama-lama di Danau Toba. Meski mayoritas penduduknya beragama Islam, Sumatera Utara belum ditetapkan sebagai destinasi wisata halal.

Pada hal kawasan ini memiliki banyak kawasan yang indah, serta kuliner yang paling enak dan varian yang cukup menarik, namun berpotensi menjadi objek wisata, namun banyak pihak yang menolak. Di sisi lain, pemangku kepentingan lainnya cukup mendukung penerapan wisata halal, mengingat banyak pengunjung yang datang ke kawasan ini berasal dari negara Islam seperti Malaysia. Terlepas dari kenyataan bahwa Sumatera Utara Kesalahpahaman bahwa konsep wisata halal digunakan untuk membenarkan suatu daerah dan memberantas budaya adalah akar penyebab banyak penolakan wisata halal. Pada kenyataannya, aspek terpenting dari wisata halal adalah :

**Atraksi**, Keindahan alam Sumatera Utara dapat memikat pengunjung dari seluruh dunia. Sumut dikatakan telah memenuhi persyaratan untuk kategori ini. **Infrastruktur**, penyediaan termasuk tempat ibadah, penginapan, makanan, dan fasilitas lainnya, merupakan komponen penting dari dukungan untuk pariwisata halal yang berdasarkan hukum Islam. **Aksesibilitas**, Penyediaan sarana atau prasarana yang memudahkan wisatawan dalam melakukan perjalanan ke tempat wisata di Sumatera Utara.

Karena tingginya potensi keberadaan Danau Toba yang banyak diminati wisatawan, maka Sumut harus bisa menerapkan wisata halal. Namun, akomodasi, layanan, pilihan restoran, dan bantuan lainnya masih bukan hal baru. Akibatnya, wisatawan mancanegara ke Sumut mayoritas masih warga Tionghoa, Malaysia, dan Singapura. Malaysia yang mayoritas penduduknya beragama Islam masih menjadi negara dengan jumlah wisatawan asing terbesar yang datang ke Sumatera Utara. dalam menghadapi potensi industri travel dan hal ini harus menjadi perhatian komponen otoritas publik khususnya dan daerah setempat agar Sumut siap sebagai kawasan industri travel halal (Suparmin et al., n.d.). Dalam rangka mempersiapkan Sumut sebagai destinasi wisata halal, hal ini harus menjadi perhatian bagi sebagian pemerintah maupun masyarakat luas. Hal ini dikarenakan pasar halal bergerak dalam perkembangan keuangan suatu daerah. Menghimpun informasi dari (Mastercard-Crescentrating, 2022) bahwa 160 juta Muslim bepergian ke negara lain sebagai turis pada tahun 2019. Diperkirakan kedatangan turis Muslim akan mencapai 140 juta pada tahun 2023 dan 160 juta pada tahun 2024 setelah dibukanya perjalanan internasional. 230 juta kedatangan yang diantisipasi pada tahun 2026 sebelum pandemi sekarang akan tercapai pada tahun 2028.

Pengeluaran yang diperkirakan dapat mencapai USD 225 miliar setiap tahun 2028. Sumatera Utara harus merencanakan industri perjalanan halal sebagai wilayah yang memungkinkan untuk pelaksanaannya. Konsep halal travel merupakan realisasi dari ajaran Islam yang memandang kehalalan dan keharaman suatu barang, sehingga sertifikat halal sangat penting bagi wisatawan muslim. Dalam laporan Thomson Reuters Worldwide Islamic Economy 2018, industri perjalanan

Muslim adalah yang terbesar kedua di planet ini. Terdapat 6 (enam) area pemanfaatan Muslim terbesar meliputi makanan, industri perjalanan, pakaian, obat-obatan, media/hiburan, dan produk perawatan kecantikan yang jumlahnya mencapai US\$ 2 triliun atau 11,9% dari pemanfaatan dunia. Dengan asumsi gagasan halal industri perjalanan diakui di Sumut, maka akan berdampak pada penurunan dan perluasan derajat gaji dan bantuan pemerintah bagi masyarakat Sumut (Salman Nasution, 2021). Dampak positif peningkatan tren wisata halal terhadap ekonomi makro Indonesia (Ramadhany & Ridlwan, 2018) juga dapat dilihat dari perspektif pendapatan nasional. Pada tahun 2016 meningkat sebesar 11%, pada tahun 2017 menjadi 13%, dan pada tahun 2019 diharapkan meningkat sebesar 15%. Devisa meningkat dari 172,8 triliun pada tahun 2016 dan 182 triliun pada tahun 2017 menjadi 275 triliun pada tahun 2019 (Effendi et al., 2021).

Wisata alam, wisata budaya, wisata religi, wisata sejarah, wisata rekreasi, dan lain sebagainya hanyalah beberapa dari sekian banyak tempat wisata di Sumatera Utara yang pasti memukau. Namun, dengan pergantian peristiwa ini, industri perjalanan halal akan mengalami kesulitan di kemudian hari. (Hasan, 2022) Organisasi Kerjasama Islam (CESIC) melakukan survei pada tahun 2017 untuk menentukan kendala paling signifikan yang dihadapi pemilik hotel saat mengimplementasikan pariwisata halal di banyak negara. Hasil review menunjukkan bahwa strategi untuk mendapatkan akreditasi halal dipandang sebagai hal yang paling sulit dipenuhi. Ujian lain yang dilihat oleh para pelaku industri perjalanan halal adalah bahwa cara memberikan halal kepada pelaku perjalanan dapat menjauhkan wisatawan non muslim lainnya dari kawasan wisata halal. Menurut temuan survei berbeda yang dilakukan oleh CESIC, banyak kendala yang menghadang pertumbuhan pariwisata halal di masa depan. Yakni :

- a. Uang, Pariwisata Islam adalah segmen industri pariwisata global yang berkembang, tetapi investor global belum mendukung pertumbuhannya secara finansial. Meskipun industri perjalanan halal dapat diciptakan bersamaan dengan minat pasar yang tinggi, prasyarat berat yang harus mengikuti hukum Islam adalah penilaian bagi para pendukung keuangan tertentu untuk memenuhi kebutuhan ini dan mempertimbangkan harapan mereka dalam menciptakan pasar. Gender: Di banyak negara mayoritas Muslim, pekerjaan perempuan di sektor pariwisata merupakan masalah karena berbagai alasan sosial dan budaya. Sebagian besar tenaga kerja Muslim secara global dipengaruhi oleh pengaturan gender yang ada, yang pada gilirannya merupakan kendala pengembangan pasar wisata syariah.
- b. Kesenjangan, dalam norma dan keyakinan sosial Islam: Sejauh memahami kualitas dan keyakinan Islam serta pengaruhnya terhadap masyarakat, negara-negara OKI berbeda secara fundamental, dan perbedaan ini juga tercermin dalam strategi untuk menumbuhkan industri perjalanan. Latihan dan promosi waktu terbatas yang lemah: Terlepas dari pentingnya industri pariwisata secara keseluruhan dan pariwisata Islam khususnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, terbukti bahwa mayoritas negara-negara Islam tidak memiliki upaya promosi dan pemasaran pariwisata halal. Pemasaran dan promosi produk wisata ke destinasi dan layanan wisata merupakan proses yang berkelanjutan dan terorganisir dengan baik. Kemajuan yang tepat juga diharapkan dapat membangun citra positif negara sebagai tujuan wisata, sehingga memperluas lingkungan kepercayaan bagi wisatawan. Meskipun demikian, sebagian besar negara yang memiliki potensi industri perjalanan Islami lemah sejauh yang ditunjukkan oleh industri perjalanan. Masalah penting ini, dengan mengoordinasikan kemajuan dan menampilkan program menuju bagian tujuan pasar industri perjalanan Islami, sangat penting untuk membangun titik fokus pasar industri perjalanan dunia.
- c. Kesulitan keamanan dan intimidasi ilegal: Salah satu aspek terpenting dari proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan. Ketidakseimbangan dalam proses tersebut akan mengganggu perkembangan moneter. Banyak negara Arab dan negara dengan mayoritas penduduk Muslim, seperti Indonesia, telah mengalami terorisme, masalah keamanan, dan kerusuhan politik selama dua dekade terakhir,

sementara industri pariwisata telah muncul sebagai salah satu sektor ekonomi terpenting dan andal negara-negara tersebut. Meskipun demikian, area industri perjalanan adalah salah satu yang sangat peka terhadap iklim yang menyedihkan, ketidakamanan keamanan dan politik, serta serangan penjual yang ketakutan. Reputasi negara-negara tujuan wisata populer menderita akibat masalah keamanan.

### **Konsep green economy terhadap potensi mengembangkan pariwisata halal di sumatera utara**

Bepergian ke suatu tempat merupakan hak semua orang. Bagi seorang muslim misalnya, bepergian justru merupakan aktivitas yang diperbolehkan dalam ajaran Islam. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan al-Baihaqi disebutkan, "Dari Ibnu Abbas ra. yaitu bahwa setiap orang berhak untuk bepergian. Misalnya, menurut ajaran Islam, bepergian sebenarnya adalah kegiatan yang diperbolehkan bagi umat Islam. Menurut hadits yang al-Baihaqi menceritakan, "Dari Ibnu Abbas ra. bersabda bahwa Rasulullah bersabda: Pergilah bepergian, kamu akan sehat dan sejahtera". Tentang setiap muslim, ia juga memiliki komitmen untuk selalu taat atau menyibukkan diri untuk tetap patuh menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi perintah Allah SWT. Semua larangan-Nya, di mana pun dan di mana pun mereka berada. Oleh karena itu, muncul ide lain dalam praktik industri perjalanan, yaitu industri perjalanan halal, di mana dalam konsep ini wisatawan Muslim dapat menjelajah sesuai syariah, dengan akomodasi yang terjamin. dalam menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhkan diri dari setiap keingkaran-Nya Yang dimaksud dengan "Tour Halal" adalah perjalanan untuk tujuan rekreasi, sosial, dan rekreasi. Kebutuhan wisata halal bagi wisatawan Muslim, sesuai dengan keyakinan mereka dan dalam rangka untuk lebih baik.

Menghargai keajaiban yang telah diciptakan Tuhan, umat Islam juga berkeinginan untuk melakukan perjalanan ke belahan dunia lain dan menyelidiki keragaman budaya dan sejarahnya. Walaupun inspirasi untuk melakukan perjalanan tidak terlalu mendalam sifatnya, ada keinginan untuk bertindak dengan sopan santun. dianggap wajar/halal sesuai dengan peraturan syariah (Syah Putra & Tucunan, 2021). Pembangunan berkelanjutan sering dikaitkan dengan studi tentang ekonomi hijau. Melalui program SDGs (Sustainable Development Goals), pembangunan berkelanjutan saat ini menjadi tujuan global yang ingin dicapai oleh setiap negara secara kolektif. Oleh karena itu, dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan, perlu terus didiskusikan konsep dan keberadaan Ekonomi Hijau. Pembangunan berkelanjutan adalah ketika pembangunan saat ini tidak menghalangi kemampuan generasi mendatang untuk membangun dan memenuhi kebutuhan mereka. Jadi, peningkatan tidak meniadakan pemeliharaan rutin (Firmansyah, 2022). Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan dan pariwisata tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling melengkapi. (Subarkah & Rachman, 2018).

Jenis pariwisata yang sedang berkembang dan mampu mendukung upaya terwujudnya pembangunan berkelanjutan adalah pariwisata halal. Karena dalam alquran Allah dengan tegas berfirman dalam QS Al-A'raf:85, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya, yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman." Maka dalam konsep pariwisata halal janganlah wisatawan merusak keindahan alam yang sudah diciptakan oleh Allah begitu indahnya. Selain ikatan

Oleh karena itu, prinsip wisata halal menetapkan bahwa wisatawan tidak boleh merendahkan keindahan alam yang telah Tuhan ciptakan dengan begitu indahnya. selain dari dampak lingkungan dari pariwisata halal. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya yang terkoordinasi dan terpadu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mengelola bagaimana sumber daya alam tersedia, dikembangkan, digunakan, dan dipelihara secara berkelanjutan. Hal ini harus dicapai dengan penataan administrasi yang baik yang mencakup kepentingan yang dinamis dan disesuaikan antara otoritas publik, kawasan rahasia, dan kawasan lokal. Sejalan dengan itu, kemajuan yang dapat dikelola tidak hanya terkait dengan masalah alam, tetapi juga masalah sistem aturan mayoritas, kebebasan dasar, dan masalah lain yang lebih luas. Tidak diragukan lagi bahwa sampai saat ini gagasan kemajuan yang berkelanjutan dipandang sebagai 'resep' perbaikan terbaik, termasuk kemajuan industri perjalanan. (Remus et al., 2021).

Table 2 Kriteria Pariwisata Halal

Kategori	Indikator
Destinasi Pariwisata (Alam, Budaya, dan Buatan)	Tersedia pilihan aktivitas wisata, seni, dan budaya yang tidak mengarah pada pornoaksi dan kemusyrikan
	Menyelenggarakan minimal satu <i>Festival Halal Life Style</i>
	Pramuwisata berpakaian dan berpenampilan sopan
	Tersedia pilihan daya Tarik wisata pantai dan pemandu yang terpisah untuk para pria dan wanita dan mempunyai aturan pengunjung tidak berpakaian minim
Hotel	Tersedia makanan halal
	Tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah seperti, Masjid, Mushola dan fasilitas bersuci (tempat wudhu)
	Tersedia pelayan pada saat bula Ramadhan untuk memenuhi kebutuhan sahur dan buka puasa
	Tidak adanya aktivitas non halal seperti, perjudian, minuman berakohol dan kegiatan diskotik
	Tersedia fasilitas rekreasi kolam renang dan fasilitas kebugaran/ gym yang terpisah antara pria dan wanita
	Apabila hotel menyediakan fasilitas spa, maak terapis pria untuk pealnggan pria dan terapis wanita untuk pelanggan wanita. Terapi tidak menggunakan bahan yang mengandungbahan yang menggunakan babi, alcohol maupun produk Turunannya
Biro Perjalanan	Menyediakan paket wisata yang sesuai dengan kriteria umum Pariwisata Halal
	Tidak menawarkan akyivitas non-halal
	Mamiliki daftar usaha penyedia makanan dan minuman halal
	Pemandu wisata memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalani tugas
	Berpenampilan sopan dan menarik sesuai etika Islam

Sumber: Tim Percepatan Pariwisata Halal, Garit Bira Widhasti., et, al (2017)

Mengingat klarifikasi ini, cenderung diungkapkan bahwa halal industri perjalanan memiliki saran untuk; (a) memperkuat keyakinan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan alasan bahwa secara praktis halal industri perjalanan harus dibebaskan dari praktik riba; (b) pembinaan karakter Islami sebagai akibat dari larangan masyir (perjudian dan bentuk perjudian lainnya) selanjutnya (c) melindungi diri dari makanan dan minuman yang tabu. Qardhawi berpendapat bahwa dengan mengkonsolidasikan sisi atas pelajaran Islam (Al-Qur'an dan Hadits), masalah keuangan Islam diyakini memiliki pilihan untuk umat manusia yang lebih mungkin berkembang. Selain itu, Fazlur Rahman menyatakan bahwa ekonomi syariah, sebagaimana syariah Islam, harus diikuti agar dapat berkontribusi pada kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Demikian pula, terciptanya kemakmuran dan keadilan bisnis merupakan tujuan syariah Islam di bidang ekonomi. (Samsuduha, 2020). Ada peluang besar bagi Sumut untuk menerapkan wisata halal; Namun, saat ini belum ada regulasi yang komprehensif tentang wisata halal di Sumatera Utara. Akibatnya, sertifikasi halal tidak diurus oleh biro perjalanan, hotel, operator pariwisata, atau bisnis lainnya. Karena di Sumatera Utara, afirmasi halal hanya diwajibkan atau disengaja. Untuk menumbuhkan wisata halal, ada enam hal yang harus

dilakukan yaitu regulasi, fatwa, sumber daya manusia, objek wisata, preferensi masyarakat, dan promosi. DSN MUI mensertifikasi hotel syariah dalam mendukung wisata halal dengan menilainya dari segi keuangan, manajemen, dan restoran (dapur). Selain itu, hotel syariah harus memiliki dua pegawai DSN. (Sayekti, 2019). Peran pemerintah dalam pengurusan sertifikasi halal kurang mendukung, dan peran ekonomi hijau dalam mengembangkan wisata halal di Sumut adalah untuk mencapai manfaat sosial dan ekonomi. Dengan pemanfaatan ekonomi hijau di kawasan industri perjalanan sangat mempengaruhi perekonomian Sumatera Utara dan sistem biologis yang dipertahankan di Sumatera Utara, namun itu sifatnya biasa saja dimana tidak ada keuntungan di dalamnya dan hanya mengantisipasi keuntungan. Di Sumatera Utara, implementasi wisata halal menghadapi sejumlah tantangan, yaitu :

**Pertama**, Ada banyak sekali penolakan masyarakat, khususnya masyarakat Danau Toba, terhadap halalnya wisata yang dianggap merugikan budaya dan kelihaihan cagar Toba. **Kedua**, Tidak ada undang-undang yang mengatakan bahwa semua aspek penyelenggaraan wisata halal harus menangani sertifikasi halal. **Ketiga**, Kesadaran akan konsep wisata halal di kalangan masyarakat. **Keempat**, Kurangnya infrastruktur untuk mendukung fasilitas yang ramah bagi umat Islam. Untuk menilai peluang dan tantangan industri pariwisata halal secara komprehensif. Langkah pertama adalah mengidentifikasi dan menyelidiki komponen rantai nilai industri pariwisata halal. SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) dari setiap titik masuk rantai nilai kemudian menjadi dasar analisis strategis. Langkah selanjutnya adalah menguraikan strategi untuk kemenangan cepat dan menyarankan opsi jangka menengah dan panjang. (Rahmi, n.d.)

Pemerintah pusat melalui Kemenparekraf/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan solusi untuk menjamin kebersihan dan kenyamanan tempat wisata serta meningkatkan perekonomian khususnya di bidang pariwisata dalam rangka mendukung pariwisata berkelanjutan dan pemberantasan Covid-19 di Indonesia. Penataannya adalah dengan memberikan CHSE Endorsement (Kerapihan, Kesejahteraan, Keamanan, dan Pengelolaan Ekologis). Motivasi pemberian wasiat ini adalah untuk membantu dukungan finansial di tengah pandemi virus Corona yang berkepanjangan. Deklarasi ini diberikan kepada Organisasi Industri Perjalanan, Keberatan Industri Perjalanan dan Produk Industri Perjalanan lainnya untuk memberikan jaminan kepada wisatawan sehubungan dengan pelaksanaan Kerapian, Kesejahteraan, Keamanan dan Perlindungan Lingkungan (Priantoko et al., 2021).

Adapun hotel-hotel yang sudah bersertifikat CHSE di Medan yaitu hotel harper wahid hasyim, saka hotel medan, swiss-belinn, grand mercure, grand inna, hotel danau toba international, cordella inn millenium, favehotel s.parmen, Aryaduta, hotel deli, cordela hotel, hermes palace, ibis styles, alam hotel, deli river, cambridge, grand central, santika premiere dyandra, hotel travellers suites. Sementara untuk rumah makan yang bersertifikat CHSE di Medan yaitu kimutkasu, kopitoast, KOI centre point, fountain ramayana, cuisine, KOI delipark, KOI sun plaza, Hanamasa, Waroeng steak dan shake, fountain medan fair, Pizza hut centre point, Kopi kenangan centre point, Cobek ayam penyet resep nusantara, steamboat yakiniku, Pizza hut s.parmen, The harvest, KFC raja medan, KFC Plaza medan fair, Pizza hut sisingamangaraja, Pizza hut gajah mada, Ayam goreng kalasan medan mall, Pizza hut Krakatau, KFC adam malik, KFC Medan mall, Kopi kenangan SPBU setia budi, KFC titi kuning medan, Holycow steakhouse, KFC simpang mataram. Sementara di Destinasi super prioritas danau toba terdapat 66 usaha pariwisata yang sudah bersertifikat CHSE antara lain Hutanta coffe, janji maria house, Homestay batu bolon, UD.Tabo cottage, Cafe Hollywood sopusurung, Rumah kaca coffe shop, 3 Brastagi hotel, Suite pakar hotel, Baktina cafe&resto, Hotel niagara, Rudang hotel dan resort brastagi, Coffe2Go, PT astari hotel bungalow, The parapat view hotel, Hotel tiara bunga, My nasha hotel tigaras, Rumah kaca, Smosir villa resort, Gundaling farmstead restaurant, Leo s restaurant, Rajawali resort, PT. Hotel danau toba, Hotel grand tamaro, Tepi danau bistro, Green's cafe balige, Hotel sibayak internasional, Warung wajik bahagia, Wisma sibayak, Sibayak cafe, Green Strapark simalungun, Restaurant TB samosir, Biwa cafe & resto, Jts Hotel and Resort, Patra

comfort parapat, PT. Tor sibohi nauli, Museum TB Silalahi centre, Carolina cottage, Pondok barata dappap, Inna parapat hotel, Ecovillage silimalambu restaurant, Zoes paradise waterfront, Romansinasi, Bona cafe Sinabung hills hotel brastagi, Homestay ita pagarbatu, Guest house rumah tamu ei, Hotel nabasa balige, Toba beach hotel, Romlan guesthouse, cafe sibayak, wisma sibayak guest house, sibayak multinational rest house, Hotel pandu lakeside, Taman simalam resort, Toledo inn, New tomok restaurant, Takar coffe also resto, warkop 32, KV surya Labersa toba hotel and convention. Penting nya sertifikat CHSE terhadap jenis usaha pariwisata untuk memudahkan wisatawan dan mendapatkan kepercayaan wisatawan dalam berpariwisata.

Pada data (Mastercard-Crescentrating, 2022) penilaian peringkat indeks perjalanan muslim global terdapat 4 kategori yaitu Akses, Komunikasi, Lingkungan dan layanan. Seperti yang sudah dijelaskan dipenjelasan diatas bahwa lingkungan atau green economy dengan pariwisata halal tidak bisa di jauhan karena lingkungan sangat penting dalam memfasilitasi perjalanan tanpa rasa khawatir di tempat tujuan wisata. Sub-kriteria dalam kategori lingkungan ini meliputi apakah wisatawan muslim memiliki tempat yang aman untuk menikmati masa inap mereka bebas dari batasan agama dan aturan berpakaian. Selain keamanan umum, tingkat kejahatan rasial dianggap pasti tingkat keamanan dari perspektif seorang musafir muslim. Selain itu, jumlah kedatangan muslim diperhitungkan sejak saat itu adalah indikator yang paling signifikan dari populasi tujuan dikalangan umat islam. "iklim yang mendukung" mempertimbangkan potensi inovasi yang dimiliki suatu destinasi untuk mengevaluasi kemampuannya untuk melacak dan memenuhi tren yang saat ini dengan cepat. Keberlanjutan adalah kriteria terbaru dalam penilaian Global Index Muslim Travel dengan tujuan upaya menghilangkan sampah plastik dan mengurangi jejak karbon. Pemerintah sumatera utara harus melek terhadap pertumbuhan yang begitu pesat terhadap tren pasar halal, dikarenakan pertumbuhan penduduk muslim di dunia terus bertambah dimana Menurut laporan Indonesia Halal Markets 2021/2022, penduduk muslim dunia menghabiskan US\$ 1,9 triliun pada 2020 untuk berbagai produk gaya hidup seperti makanan minuman, fesyen, rekreasi, dan pariwisata. Maka dari itu pemerintah beserta elemen masyarakat harus mendobrak pasar halal di sumatera utara agar pertumbuhan ekonomi di sumatera utara terus meningkat dan menurunkan angka inflasi di sumatera utara yang sama-sama kita tau bahwa Inflasi Sumut bulan Januari 2023 tercatat 5,99persen (yoy), lebih tinggi dibanding nasional (5,28persen).

Sebuah survei yang dilakukan oleh CrescentRating antara bulan September dan November 2021 mengungkapkan bahwa faktor penting yang dipertimbangkan umat Islam saat merencanakan perjalanan adalah ketersediaan layanan ramah Muslim dari data tersebut banyak warga indonesia yang mengharapkan infrakstruk ramah muslim seperti masjid , makanan halal , dll. Semoga ini bisa menjadi PR pemerintah khususnya pemerintah sumatera utara memikirkan kembali atas peluang-pelunag tersebut. Apalagi untuk saat ini pariwisata halal di indonesia telah menjadi perhatian dunia dikarenakan indonesia peringkat kedua pada Global Index Muslim Travel tahun 2022.

Untuk menjadi halal industri perjalanan sebagai andalan utama perbaikan moneter yang mendorong pengelolaan, fokus pada aspek-aspek yang menyertainya adalah penting:

- a. Kontribusi pariwisata Islami terhadap pertumbuhan ekonomi Banyak daerah yang sudah memiliki kerangka dasar dan pengaturan iklim untuk mengatasi masalah wisatawan Muslim. Mereka dapat menjadikan industri pariwisata Islam sebagai bagian yang sangat penting bagi pertumbuhan dan kemakmuran ekonomi negara.
- b. Kreatif item industri perjalanan. Negara-negara Islam memiliki peluang untuk membuat paket wisata orisinal dan kreatif yang menggabungkan kegiatan budaya dengan wisata religi tradisional.
- c. Kenaikan volume investasi. Area industri perjalanan dijelaskan oleh komitmen dengan banyak latihan moneter lainnya yang menambah hasil industri perjalanan. Industri perjalanan mungkin dapat membantu penciptaan dan usaha. Akibatnya, industri pariwisata berkontribusi pada stimulasi investasi infrastruktur, seperti transportasi, komunikasi, dan fasilitas wisata, serta pembangunan pabrik dan fasilitas industri untuk menghasilkan barang dan jasa permintaan wisatawan.



- d. Buat berbagai aliran pendapatan. Mengingat banyaknya industri perjalanan yang diharapkan di banyak negara Islam, dan dengan perkembangan yang terus berlanjut dan minat yang meningkat untuk produk dan administrasi yang sesuai dengan syariah, serta perkembangan kritis di pasar industri perjalanan Islam, industri perjalanan halal telah menjadi sangat mungkin dari pilihan moneter utama. dengan mengarahkan ekonomi ke berbagai pasar dan sektor baru, diversifikasi ekonomi dapat dicapai.

Komponen fundamental penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Karena pariwisata melibatkan banyak sektor ekonomi lainnya, hal itu mendorong terciptanya lapangan kerja baru yang dapat menampung banyak orang. Pariwisata merupakan industri padat karya, sehingga jumlah lapangan kerja yang tercipta juga sangat tinggi. Pekerjaan-pekerjaan tersebut dapat secara langsung terkait dengan penggunaan tujuan wisata, seperti pekerja transportasi pariwisata, pengembangan pariwisata, melindungi wisatawan, dan memelihara urusan mereka, atau dapat secara tidak langsung terkait dengan penciptaan lapangan kerja di industri yang memasok barang dan jasa pariwisata. dibutuhkan, seperti pekerja infrastruktur, petani, pedagang makanan, petugas kesehatan, dan sebagainya.,

## KESIMPULAN

Dalam pembangunan berkelanjutan, *green economy* memiliki upaya yang signifikan termasuk memusnahkan kemiskinan dan mengupayakan kepuasan pribadi tanpa melenyapkan sistem biologis dan aset normal yang ada. Selain itu, ekonomi hijau memerlukan penciptaan modal fisik, teknologi, dan keuangan melalui penggunaan bahan bakar fosil, yang mengakibatkan kerugian alam. Upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan tidak selalu berhasil, terbukti dengan angka kemiskinan di perdesaan 7,98 persen lebih rendah dari angka kemiskinan di perkotaan yang mencapai 8,76 persen. Mengingat jumlah umat Islam internasional yang berkunjung ke Sumut pada 2019 mencapai 160 juta jiwa, menerapkan wisata halal menjadi salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan di sana. Wisatawan muslim diharapkan mencapai 140 juta pada tahun 2023 dan 160 juta pada tahun 2024 menyusul dibukanya perjalanan internasional. Estimasi pra-pandemi 230 juta kedatangan pada 2026 baru terealisasi sejak 2028. Konsumsi diperkirakan bisa mencapai USD 225 miliar dari . Untuk mendukung pariwisata yang berkelanjutan dan juga menghapuskan covid-19 di Indonesia pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif memberikan solusi untuk menjamin kebersihan dan kenyamanan tempat wisata serta untuk mendongkrak roda ekonomi, khususnya pada sektor pariwisata. Solusi tersebut adalah menerbitkan Sertifikat CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability). Sumut memiliki restoran dan penginapan yang telah tersertifikasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability) untuk mendukung pariwisata berkelanjutan dan bebas covid-19 dalam rangka mewujudkan Ekonomi Hijau. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki data yang menunjukkan bahwa 22 hotel di Medan, 33 restoran, dan satu objek wisata semuanya bersertifikat CHSE. Sementara itu, terdapat 66 penginapan dan tempat makan bersertifikat CHSE di kawasan Danau Toba yang menjadi tujuan utama

## SARAN

Berikut adalah saran yang dapat diberikan terkait hasil penelitian :

1. Saran Praktis

Kepada pemerintah Sumatera Utara agar terus mengupdate perkembangan tentang regulasi pariwisata halal dengan cara melakukan pertemuan secara khusus untuk membahas lebih lanjut tentang regulasi pariwisata halal bahwa pariwisata halal juga mampu mendongkrak perekonomian dan terus mengonfirmasikan kepada masyarakat dengan mengadakan seminar atau program dengan datang ke seluruh daerah di Sumatera Utara agar masyarakat tau lebih luas mengenai pariwisata halal dan terus membangun pembangunan yang menciptakan

kemashalahatan dan sosialisasi tentang *green economy* maupun pariwisata halal karena keduanya memiliki keterkaitan dalam menjaga lingkungan, terus membuat inovasi-inovasi baru agar pencemaran lingkungan di Sumatera Utara khususnya daerah pariwisata semakin berkurang dan selalu menanam bibit-bibit pohon di sekitar lingkungan wisata agar mengurangi emisi karbon dengan tujuan keberlanjutan.

## 2. Saran Teoritis

Diharapkan kepada penelitian selanjutnya agar lebih banyak menggunakan data- data terbaru dan data-data yang signifikan dengan cara mencari di Artikel yang membahas tentang *Green Economy* maupun Pariwisata halal dan juga buku-buku sesuai dengan variabel yang dicari seperti buku tentang *Green Economy* dan Pariwisata halal.

## REFERENSI

- Adinugraha, H. H., Nasution, I. F. A., Faisal, F., Daulay, M., Harahap, I., Wildan, T., Takhim, M., Riyadi, A., & Purwanto, A. (2021). Halal Tourism in Indonesia: An Indonesian Council of Ulama National Sharia Board Fatwa Perspective. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(3), 665–673.
- Bambang Sutikno, J. B. (2017). Analisis Kearifan Lokal Terhadap Pembangunan Ekonomi Hijau Di Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 243–256.
- Battour, M., & Ismail, M. N. (2016). Halal tourism: Concepts, practises, challenges and future. *Tourism Management Perspectives*, 19, 150–154.
- BI. (2022). Laporan Perekonomian Global. *Bank Indonesia*, 1–33. [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)
- BPS. (2023). *Jumlah Wisman ke Sumatera Utara pada Januari 2023*.
- Bustamam, N., & Suryani, S. (2022). Potensi Pengembangan Pariwisata Halal dan dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 32(2), 146–162.
- Ciocioiu, C. N. (2016). *Integrating Digital Economy And Green Economy: Opportunities For INTEGRATING DIGITAL ECONOMY AND GREEN ECONOMY: OPPORTUNITIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT Theoretical and Empirical Researches in Urban Management*. May.
- Darmalaksana, W., & Busro, B. (2021). Pariwisata Halal Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Takhrij Hadis. *Masyarakat Pariwisata: Journal of Community Services in Tourism*, 2(2), 99–108.
- Dwi, E., Marswandi, P., Sudiarta, H., Furkan, L. M., Manajemen, S. M., & Mataram, U. (2023). Analisis Preferensi Wisatawan terhadap Minat Pariwisata Halal di Pulau Lombok. 6, 3560–3567.
- Effendi, D., Rosadi, A., & Prasetyo, Y. (2021). International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage Preparing Halal Tourism Regulations in Indonesia Preparing Halal Tourism Regulations in Indonesia. *International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage*, 9(1), 58–69.
- Ekonomi, F., Uin, B. I., Utara, S., & Konsep, A. (2023). *Volume . 19 Issue 1 ( 2023 ) Pages 89-97 INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen ISSN: 0216-7786 ( Print ) 2528-1097 ( Online ) Peran sektor industri manufaktur dalam mendukung gerakan green economy The role of the manufacturing industry sector*. 1(1), 89–97.
- Erwingsyah, E. (2021). Peluang Ekonomi Hijau Dan Ketrampilan Hijau Menuju Netral Karbon Indonesia Tahun 2060. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 8(2), 159.
- Fariad, A. I. (2020). Analisis Meredam Angka Kemiskinan Melalui Pendekatan Ekonomi Hijau di Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 20(1), 1–11.
- Ferdiansyah, H. (2020). Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia Melalui Konsep Smart Tourism. *Tornare*, 2(1), 30.
- Firmansyah, M. (2022). Konsep Turunan Green economy dan Penerapannya: Sebuah Analisis Literatur. *Ecoplan*, 5(2), 141–149.

- Georgeson, L., Maslin, M., & Poessinouw, M. (2017). The global green economy: a review of concepts, definitions, measurement methodologies and their interactions. *Geo: Geography and Environment*, 4(1).
- GGGI. (2016). *Pertumbuhan Ekonomi Hijau dan Perencanaan Investasi*.
- Hasan, H. A. (2022). Pariwisata Halal : Tantangan Dan Peluang Di Era New Normal. *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 13(1), 54–66.
- Junaidi, J. (n.d.). *Halal-friendly tourism and factors influencing halal tourism*.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2020). *Statistik Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020*. In *Www.Kememparekraf.Go.Id*.
- Kristianto, A. (2020). SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DALAM KONSEP GREEN ECONOMY UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI BERKUALITAS BERBASIS EKOLOGI. *JBEE: Journal Business Economics and Entrepreneurship*, 2.
- Lavrinenko, O., Ignatjeva, S., Ohotina, A., Rybalkin, O., & Lazdans, D. (2019). The role of green economy in sustainable development (Case study: The eu states). *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 6(3), 1113–1126.
- Mabrurin, A., & Latifah, N. A. (2021). MASYARAKAT ( *Studi Pada Wisata Religi Di Makam Gus Miek Kabupaten Kediri dan Mbah Wasil Kota Kediri* ). 1(1), 63–88.
- Mafudi, M., Sugiarto, S., & Praptapa, A. (2021). Emerging Opportunities for Halal Tourism in Rural Areas: Insights from Indonesia. *Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 20(1), 16–26.
- Mastercard-Crescentrating. (2022). *Global Muslim Travel Index 2022 Report*. June, 31–62.
- Priantoko, A., Anbia, E. F., Margaretha, G., Wulan, R., Panggabean, N., Keuangan, P., & Stan, N. (2021). TINJAUAN PENERAPAN EKONOMI HIJAU DALAM PARIWISATA DI PROVINSI BALI REVIEW OF THE APPLICATION OF GREEN ECONOMY IN TOURISM IN BALI PROVINCE. 2(1).
- Rahmi, A. N. (n.d.). Asri Noer Rahmi: Perkembangan Pariwisata... PERKEMBANGAN PARIWISATA HALAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA. *Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 2020.
- Remus, S. P., Tarmizi, H. B., Daulay, M., & ... (2021). Pengaruh Ekonomi Pariwisata Berkelanjutan Kawasan Strategis Nasional Danau Toba Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat. *Prosiding Seminar Nasional Planoeearth*, 113–123.
- Salman Nasution. (2021). Konsep Pariwisata Halal Berbasis Ekonomi Kreatif D. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 21(2), 22–47.
- Samsuduha, S. (2020). Wisata Halal Sebagai Implementasi Konsep Ekonomi Syariah. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 1(1), 20.
- Sayekti, N. W. (2019). Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia. *Kajian*, 24(3), 159–171.
- Siregar, K. H., & Ritonga, N. (2021). Pariwisata Halal: Justifikasi Pengembangan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan. *JEpa*, 6(1), 416–426.
- Soesanto, S. (2022). Akuntansi Lingkungan Menuju Ekonomi Hijau Perspektif Relasi Natural Sustainability Dengan Keberlanjutan Bisnis. *Account*, 9(1), 1581–1589.
- Subarkah, R., & Rachman, J. B. (2018). Wisata Halal Untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Halal Tourism for Sustainable Development Goals. *Konferensi Nasional Ilmu ...*, 1–6.
- Suparmin, S., Fakultas, Y., & Dan Bisnis, E. (n.d.). *Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Di Propinsi Sumatera Utara*.
- Sverdan, M. (2021). Green Economy: Development in the Light of New Policy. *Green, Blue & Digital Economy Journal*, 2(1), 45–52.
- Syah Putra, M. F., & Tucunan, K. P. (2021). The Concept of Halal Tourism and The Fulfillment of Muslim Tourist Needs in Halal Tourism. *Halal Research Journal*, 1(2), 56–62.
- UNWOT. (2018). *SUSTAINABLE DEVELOPMENT*.

**Ermelia, Imsar**

Analisis Konsep Green Economy Terhadap Potensi Pengembangan Pariwisata Halal Di Sumatera Utara

Yan, L. S., Zahari, N. A., Ismail, A. S., & Zain, N. M. (2017). Halal Tourism: A New World for Tourism Industry. *International Journal of Asian Social Science*, 7(8), 643–657.

Zhironkin, S., & Cehlár, M. (2022). Green Economy and Sustainable Development: The Outlook. In *Energies* (Vol. 15, Issue 3).